

Surat dari Cinangka

Aku Tak Ingin Dihormati, Jika Kehormatanku Mengganggu

Sahabat, Ramadhan tahun ini terasa begitu cepat. Teringat hari-hari sekira 10 tahun lalu saat saya masih mengaji di Pondok Pesantren, di Ponorogo Jawa timur. Ramadhan kala itu saya merasa begitu bersih atau lebih tepatnya merasa diri 'lebih bersih' dari mereka yang tak berpuasa.

Di hari-hari saya berpuasa dan merasakan sebuah waham merasa di hormati tentu diluar tekad saya sendiri berniat tak makan dan tak minum sejak dini hari hingga senja; selama itu saya sadar bahwa akan ada saat-saat saya bisa tergoda—tetapi saya selamat. Saya siap untuk terganggu, tetapi lihat: saya tak boleh diganggu.

Privilese itu kini sudah seperti sesuatu yang semestinya. Demi ibadah saya, yang saya niatkan sendiri, orang-orang lain tak bisa pergi pijat karena selama sebulan semua panti pijat harus ditutup—meskipun ini bukan tempat yang mesum sama sekali—dan sekian ratus pemijat tidak mendapatkan penghasilan. Demi ibadah saya, orang-orang lain tidak dapat minum dan makan dengan bebas dan walaupun ada restoran buka, bir, anggur, wiski, konyak, vodka, dan lain-lain harus masuk kotak.

Terkadang saya tak tahu apakah saya merasa bangga, atau bersyukur, atau merasa bersalah, ketika di mana-mana dipasang anjuran: "Hormatilah Orang yang Berpuasa".

Tentu saja sikap menghormati adalah sebuah sikap yang bisa datang dari hati yang ikhlas dan sukarela. Tapi sikap itu juga bisa diperlihatkan khalayak ramai karena aturan pemerintah, para ulama, atau tekanan lain yang menakutkan. Kita sekarang tidak tahu yang mana yang menentukan. Jika ada polisi atau petugas kota praja—belum lagi kelompok galak yang dengan gampang menyerbu dan merusak—yang membuat penghormatan itu berlaku, saya tak pernah yakin sejauh mana penghormatan (atau lebih tepat "apresiasi") yang ikhlas yang sedang saya rasakan. Jangan-jangan semuanya adalah penghormatan (atau lebih tepat "sikap merunduk") yang dengan gerutu.

Tapi di sebuah negeri yang tak jarang memperdagangkan kepalsuan, akhirnya soal seperti itu tak dipersoalkan. Pokoknya: saya berpuasa, sebab itu saya harus dihormati.

Ramadan sering dikatakan sebagai bulan yang dekat dengan rohani. Bulan ini adalah bulan yang berbicara tentang kondisi dasar manusia yang paling kurang. Aku seakan-akan dalam kesucian, sebagai yang "berkorban" dan juga sebagai yang "tak najis". Orang yang tak berpuasa? Mereka dosa, loba, penuh syahwat—pendeknya lebih nista dari diriku.

Tetapi bila puasa bukan menandakan wajah yang lapar, melainkan kesucian diri yang penuh, manusia merasa seakan-akan berada di atas segala situasi, di luar waktu, tak tersentuh perubahan, dan perubahan bahkan dapat berarti najis.

Di hari-hari ini saya berpuasa—dan apakah gerangan yang tumbuh dalam diri saya? Sesuatu yang menghargai yang fana dan sebab itu berterima kasih atas setiap momen empati? Atau sesuatu yang meminta dihormati, karena aku adalah sebuah prestasi, sebuah posisi di atas sana, di mana yang kekal dan sempurna mengangkatku?

Jika sekarang setelah 10 tahun berlalu, di Cinangka ini saya ditanya bagaimana puasamu. Saya akan mengatakan: Aku tak ingin dihormati jika kehormatanku menjadi alasan bagimu untuk terganggu, biarlah puasaku menjadi alasan paling logis untuk menjadikan aku makin kuat dan dekat pada tuhanku dengan menahan diri dan menghormati engkau yang tak berpuasa. Salam dari Cinangka

Gus Dur Tentang Islam dan Pancasila*

Dawam Multazam

Mahasiswa Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, ideologi dasar bagi negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi sebuah *kalimatun sawa'* atau *common ideological platform* yang dapat merangkul semua elemen bangsa. Dengan Pancasila, Indonesia tidak hendak menjadi sebuah negara yang teokratis sekaligus negara yang sekuler. Penegasan posisi negara inilah yang menyebabkan kebanyakan orang Islam di Indonesia merasa puas dan menganggap Pancasila sudah cukup Islami, meskipun tetap tidak dapat ditampik keberadaan sebagian kecil di antaranya yang menolak Pancasila dan berkeinginan untuk membentuk Negara Islam. Bahkan keberadaan kelompok *splinter* tersebut masih eksis hingga saat ini, sebagaimana dapat ditemukan contohnya seperti dalam kelompok Front Pembela Islam yang menganggap bahwa Indonesia belum cukup Islami sehingga merasa perlu untuk mengampayekan "NKRI Bersyari'ah". Bahkan kelompok lain, Hizbut Tahrir Indonesia yang berafiliasi pada organisasi transnasional Hizbut Tahrir, aktif mempropagandakan perlunya menegakkan khilafah karena segenap bangunan kenegaraan Indonesia sama sekali tidak Islami. Namun, eksistensi kelompok-kelompok tersebut tidak cukup kuat untuk menggoyahkan dukungan masyarakat luas terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

Dukungan yang solid dari masyarakat terhadap Pancasila, salah satunya karena Pancasila dapat menjadikannya yang komplit dalam menyelesaikan masalah kehidupan bernegara yang kompleks. Menurut Yudi Latif dalam artikelnya di Harian KOMPAS (28/5), dengan memanfaatkan landasan visi transformasi sosial yang holistik dan antisipatif yang disediakan oleh Pancasila, krisis multidimensional yang melanda bangsa ini bisa diselesaikan. Hal ini dimungkinkan setidaknya karena Pancasila memiliki alat untuk melakukan aksi pada ranah mental-kultural (sila ke-1, 2, dan 3), ranah politikal (sila ke-4), dan ranah material (sila ke-5). Dengan konsep ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila, masyarakat Indonesia dapat mencapai kepribadian manusia yang berbudaya; dengan konsep kerakyatan deliberatif, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang berdikari; dan dengan konsep kesejahteraan umum, masyarakat Indonesia dapat meraih kemandirian. Dengan demikian, tiga ranah Pancasila tersebut memang sesuai dengan konsep Trisakti yang digagas oleh Proklamator Republik Indonesia, Sukarno.

"Keparipurnaan" Pancasila sebagai solusi dalam segenap permasalahan bangsa tersebut juga tersirat dan tersurat dalam pemikiran KH Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4 yang akrab disapa dengan sebutan Gus Dur.

Tujuan Bernegara

Indonesia, menurut Gus Dur (1990), menyuguhkan potret menarik tentang hubungan Islam dan Pancasila. Di tengah negara yang prosentase jumlah penduduknya mayoritas Muslim sekaligus memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, ternyata di sini tidak terjadi sikap eksklusif yang memutuskan bahwa Islam harus menjadi ideologi politik. Masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa Islam dapat berbagi (*share*) dengan pendapat atau kepercayaan lain, baik terkait dalam hal agama maupun dalam urusan politik. Sikap ini, disebut Gus Dur, menjadi indikasi bahwa Islam di Indonesia bisa menjadi pelopor dalam masalah-masalah ideologis terkait. Hal ini tentu saja tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah merupakan kristalisasi dari pengalaman keislaman masyarakat Nusantara sejak

pertama kali Islam datang. Dipeluknya Islam oleh masyarakat Nusantara, tidak serta merta mengakibatkan terlepasnya identitas *indigenous* yang dimiliki.

Sikap keberagaman yang inklusif inilah yang kemudian melahirkan Pancasila dengan lima silanya. Inklusifitas ini, menurut Gus Dur, memang lahir dari karakter masyarakat-bangsa Indonesia. Dilihat dari latar belakang sejarah, tidak ada satu pun ideologi ketat (*rigid*) yang dapat diterapkan secara luas di Indonesia, sebagaimana dapat dicontohkan dengan Gerakan Paderi di awal abad ke-19 yang diilhami oleh purifikasi agama Islam ala Wahabi. Beruntung, purifikasi agama dengan memerangi sesama Muslim yang berbeda perspektif itu berbelok menjadi perang melawan kolonial Belanda. Keragaman pola pikir terhadap agama yang masih berkembang bahkan hingga kini ini, disebabkan karena Indonesia adalah bangsa yang lunak (*soft nation*, dalam istilah Gunnar Myrdhal). Di satu sisi, kelunakan dan inklusifitas ini bisa memperkaya keragaman bangsa ini sehingga tidak pernah bisa terpecah-pecah secara serius. Di sisi lain, ia juga memiliki "kelemahan" karena berkarakter "tanggung, setengah-setengah". Namun menurut Gus Dur, sikap seperti yang sudah ada sekarang inilah yang lebih tepat ada di Indonesia.

Pendapat ini tak lepas dari *weltanschauung* Gus Dur tentang Islam. Bagi Gus Dur, ketika Islam yang universal bertemu dengan realita masyarakat di Indonesia, maka terjadilah proses pribumisasi Islam. Mencairnya Islam dalam kehidupan masyarakat pemeluknya tersebut bisa terjadi, karena yang menjadi tujuan dari *civitas* masyarakat dalam sebuah komunitas adalah kesejahteraan. Dan dalam konteks Indonesia, maka kesejahteraan tersebut dapat terwujud melalui negara Pancasila. Dalam hal ini, bukan berarti Islam "terkalahkan" oleh Pancasila. Selain karena memang keduanya bukanlah dua entitas yang dapat "diadu", melainkan karena dalam hubungannya Pancasila dituntut untuk mewujudkan nilai-nilai Islam sebagaimana dikenal sebagai *ushulu-l-khomsah*. Artinya, tujuan (*ghoyah*) kesejahteraan yang dipayungi nilai-nilai Islam harus dicapai dengan memanfaatkan Pancasila sebagai alatnya (*wasilah*).

Penerimaan Gus Dur terhadap asas tunggal Pancasila pada 1984 menegaskan persetujuannya bahwa Pancasila sudah sesuai dengan Islam. Selain melalui isu Hak Asasi Manusia yang mempertemukan antara Islam dengan Pancasila, Pancasila sendiri juga sudah menyiratkan bahwa Islam adalah landasan moralnya. Sebagaimana diketahui, deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) selaras dengan *maqshidu-s-syari'ah ad-dhoruriyyah* (primer) yang terdiri dari lima unsur penjagaan terhadap manusia (*kulliyatu-l-khoms*), yakni *hifdhu-nafs* (hak hidup), *hifdhu-d-din* (hak beragama), *hifdhu-l-aql* (hak berfikir), *hifdhu-l-mal* (hak kepemilikan), dan *hifdhu-n-nasl* (hak berkeluarga). Keselarasan dalam Hak Asasi Manusia tersebut, setidaknya terejawantahkan dalam nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi komitmen negara untuk melindungi semua warganya tanpa melihat latar belakang agama, jenis kelamin, atau etnis. Dengan menjadikan sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" sebagai spirit bagi sila-sila lainnya, hak asasi manusia terlindungi oleh sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", dan seterusnya.

Dengan memperhatikan pada tujuan substantif - terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam payung Islam sebagaimana disebut di atas, penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila juga harus

dilihat sebagai langkah strategis bagi Nahdlatul Ulama. Mengingat konteks pada 1983 itu, ketika menerima Pancasila sebagai asas tunggal, hubungan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah Orde Baru tidak dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, dengan mengakui Pancasila sebagai asas tunggal, Nahdlatul Ulama dapat "merebut" Pancasila dari hegemoni kekuasaan Orde Baru untuk kemudian menjadikannya sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam payung Islam.

Pancasila Sebagai Titik Temu

Pada akhirnya, dengan menjadikan Pancasila sebagai wahana untuk mengatur alat-alat penyelenggara negara, tentunya persatuan bangsa dapat diraih. Dengan demikian, sangat tepat jika kemudian Gus Dur (1999) menganggap bahwa Pancasila merupakan kompromi politik yang memungkinkan semua orang Indonesia hidup bersama-sama dalam sebuah kesatuan negara nasional (bukan negara teokrasi atau negara Islam). Penerimaan terhadap Pancasila merupakan hal yang niscaya, karena Gus Dur melihat bahwa proses lahirnya negara-bangsa ini dibarengi dengan pertarungan dua kubu ideologi (sekuler dan teokratis) yang sudah lama memiliki eksistensi di negeri ini. Di satu sisi, kubu sekuler yang terbagi juga dalam kelompok *interest* nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, dan komunisme menginginkan adanya pemisahan tegas antara agama dan kehidupan bernegara. Adanya pemisahan ini berarti agama tidak turut campur dalam urusan kenegaraan, sebaliknya negara juga tidak dibenarkan mengambil peran dalam urusan keagamaan. Di kubu yang lain, ada kecenderungan kelompok yang menginginkan agar agama (dalam kasus Indonesia, agama Islam) untuk menjadi acuan formal dan penentu kekuatan utama dalam kehidupan bernegara. Secara konseptual dapat diartikan sebagai negara teokratis.

Hingga saat ini pertarungan wacana antara kubu sekuler melawan kubu teokratis, atau antara Pancasila sebagai "ideologi nasional" dan Islam sebagai "jalan hidup universal (*universal way of life*)" masih terus berlangsung secara dinamis, sehingga menjadi semacam kondisi *status quo* yang justru dapat menjadi panggung wacana dan dialog yang semakin menarik. Namun demikian, Gus Dur menegaskan bahwa Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari tentang hidup bernegara yang mutlak untuk diperjuangkan. Upaya perjuangan ini, menurut Gus Dur, harus dipertahankan agar kemurnian Pancasila dapat terjaga dari upaya-upaya manipulasi terhadapnya.

Apapun hasilnya, bagi Gus Dur, tentu akan memberikan manfaat bagi negara-bangsa Indonesia, sekaligus menjadi contoh bagi negara-bangsa lainnya. Tentunya tujuan (*ghoyah*) kemanfaatan dan keberkahan menjadi lebih menarik bagi kita daripada perdebatan tentang alat (*wasilah*) yang digunakan. *Wallahu a'lam*.

**

